



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN JEMBER MENURUT PENGELUARAN 2013-2017



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN JEMBER**

A black and white photograph of a woman in traditional Jember attire, featuring a large, ornate headdress with floral and leaf-like decorations. She is smiling and looking towards the camera. The image is partially obscured by a diagonal grey band that runs from the top left to the bottom right, which serves as a background for the title text.

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN JEMBER
MENURUT PENGELUARAN 2013-2017**

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN JEMBER MENURUT PENGELUARAN
TAHUN 2013 – 2017

ISBN : -

No. Publikasi : 35095.9803

Katalog : 9302004.3509

Ukuran Buku : 21 cm X 28 cm

Jumlah Halaman : xii + 82

Naskah : Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Sampul : Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Keterangan Sampul :

Foto: Icon Kabupaten Jember

Diterbitkan Oleh : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember

Prohibited announce, distribute, communicate, and/or copy part or all of the contents of this book for commercial purposes without the written permission of the Central Bureau of Statistics of Jember Region

TIM PENYUSUN / DRAFTING TEAM

Pengarah/Directur :

Ir. Indriya Purwaningsih, MT

Penanggungjawab Umum :

Ir. Indriya Purwaningsih, MT

Penulis/Writer:

Ir. Endang Widyarti, MM

Penyunting/Editor:

Ir. Endang Widyarti, MM
Oanesa Timoralif Cahya, A.Md

Pengolah Data:

Ir. Endang Widyarti, MM

Desain Kover/Lata Letak :

Ir. Endang Widyarti, MM
Oanesa Timoralif Cahya, A.Md

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan.

Publikasi ini secara khusus membahas PDRB menurut pengeluaran/permintaan akhir, yang dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor dan Impor Antar Daerah, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Jember , Juli 2018

BPS Kabupaten Jember
Kepala,



Ir. Indriya Purwaningsih, MT

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Grafik	x
Daftar Lampiran	xi
Infografis	xii
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	3
1.2 Kegunaan Statistik PDRB	5
BAB II METODA ESTIMASI DAN SUMBER DATA	7
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga	9
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT	13
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah	16
2.4 Pengeluaran Modal Tetap Bruto (PMTB)	19
2.5 Perubahan Inventori	24
2.6 Ekspor Impor	29
BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN TAHUN 2013-2017	31
3.1 Tinjauan Agregat PDRB Menurut Pengeluaran	33
3.2 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga	41
3.3 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT	46
3.4 Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah	47
3.5 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	49
3.6 Perkembangan Perubahan Inventori	50
3.7 Perkembangan Ekspor	52
3.8 Perkembangan Impor	53
3.9 Perkembangan Net Ekspor Antar Daerah	54
BAB IV PERKEMBANGAN AGREGAT PRDB MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN JEMBER TAHUN 2013-2017	57
4.1 PDRB (Nominal)	59
4.2 Perbandingan Pengeluaran PDRB untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor	60

4.3 Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	61
4.4 Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDRB	62
4.5 Perbandingan Ekspor terhadap PMTB	63
4.6 Perbandingan PDRB terhadap Impor	64
4.7 Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan	65
4.8 Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	66
PENUTUP	70
LAMPIRAN	73
DAFTAR PUSTAKA	81

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Jember Tahun 2013-2017 34
Tabel 2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Jember Tahun 2013-2017 35
Tabel 3	Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Jember Tahun 2013-2017 38
Tabel 4	Pertumbuhan Menurut Pengeluaran, Kabupaten Jember Tahun 2013-2017 39
Tabel 5	Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Jember, Tahun 2013-2017 41
Tabel 6	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Jember, Tahun 2013-2017 42
Tabel 7	Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Jember, Tahun 2013-2017 44
Tabel 8	Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Jember, Tahun 2013-2017 45
Tabel 9	Perubahan Indeks Harga Implisit Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga Kabupaten Jember, Tahun 2013 – 2017 (Persen) 46
Tabel 10	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi LNPRT Kabupaten Jember, Tahun 2013-2017 47
Tabel 11	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Jember, Tahun 2013-2017 48
Tabel 12	Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Jember, Tahun 2013-2017 50
Tabel 13	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Jember, Tahun 2013-2017 51
Tabel 14	Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Jember, Tahun 2013-2017 52
Tabel 15	Perkembangan Impor Barang dan Jasa Kabupaten Jember, Tahun 2013-2017 53
Tabel 16	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Jember, Tahun 2013-2017 60
Tabel 17	Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Tahun 2013-2017 61
Tabel 18	Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Tahun 2013-2017 61
Tabel 19	Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Jember, Tahun 2013-2017 62
Tabel 20	Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB) Tahun 2013-2017 63

Tabel 21	Rasio PDRB terhadap Impor Kabupaten Jember Tahun 2013-2017	64
Tabel 22	Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Kabupaten Jember Tahun 2013-2017	65
Tabel 23	Incremental Capital output Ratio (ICOR) Kabupaten Jember Tahun 2013-2017	67

<https://jemberkab.bps.go.id>

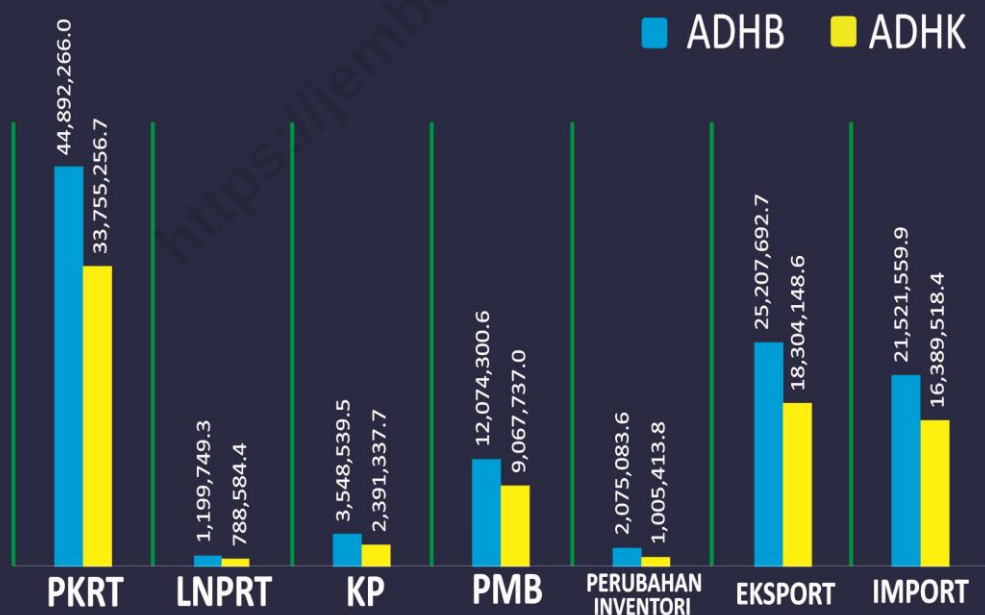
DAFTAR GRAFIK

		Halaman
Grafik 1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Jember 2013– 2017	35
Grafik 2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Jember, Tahun 2013-2017	36
Grafik 3	Perbandingan PDRB Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010, Kabupaten Jember 2013-2017	37
Grafik 4	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Jember Tahun 2013 - 2017	39
Grafik 5	Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Jember 2015-2017	40

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1	75
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Jember Tahun 2013-2017	
Lampiran 2	76
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Jember Tahun 2013-2017	
Lampiran 3	77
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Jember Tahun 2013-2017	
Lampiran 4	78
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Jember Tahun 2013-2017	
Lampiran 5	79
Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran, Kabupaten Jember Tahun 2013-2017	
Lampiran 6	80
Laju Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran, Kabupaten Jember Tahun 2013-2017	

PDRB PENGELUARAN



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN JEMBER**

<https://jemberkab.bps.go.id>

PENDAHULUAN

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

Produk domestik regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB pengeluaran merupakan aturan dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB pengeluaran itu menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agrerat penting dapat diturunkan dari PDRB pengeluaran ini seperti variable Pengeluaran Konsumsi Akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga

yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 dan ini tentu akan mencerminkan struktur ekonomi terkini

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

a. Menurut Pendekatan Produksi,

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu:

1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian,
3. Industri Pengolahan,
4. Pengadaan Listrik dan Gas,
5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang,
6. Konstruksi,
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor,
8. Transportasi dan Pergudangan,
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum,
10. Informasi dan Komunikasi,
11. Jasa Keuangan dan Asuransi
12. Real Estat,
13. Jasa Perusahaan,
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib,
15. Jasa Pendidikan,
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial,

17 Jasa lainnya.

Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

b. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

c. Menurut Pendekatan Pengeluaran

1. pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga
2. pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga
3. pengeluaran konsumsi akhir pemerintah
4. pembentukan modal tetap domestik bruto
5. perubahan inventori, dan
6. ekspor neto (ekspor dikurangi impor)

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto

1.2 KEGUNAAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian suatu wilayah setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

- a. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
- b. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
- c. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu negara. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu negara.
- d. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.
- e. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
- f. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan luar negeri.
- g. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
- h. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

<https://jemberkab.bps.go.id>

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

2

BAB II

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

i. Pendahuluan

Komponen konsumsi rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain

ii. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan

iii. Cakupan

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (United Nations), sbb

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alas kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya

5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Karena keterbatasan data, maka dalam penyajian di publikasi ini, 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali menjadi hanya 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sbb:

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*).

Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer)

- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri.

- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen diluar wilayah atau diluar negeri (diperlakukan sebagai impor)

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut)
- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.
- Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

iv. Perhitungan PKRT Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan.
- Jumlah penduduk pertengahan tahun.
- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu.
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

2. Metode Perhitungan

Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Untuk menghasilkan perhitungan PKRT yang mencerminkan kondisi sesungguhnya, masih diperlukan adanya beberapa penyesuaian (*adjustment*). Penyesuaian dilakukan dengan menggunakan data pendukung (data sekunder) dalam bentuk indikator suplai (di luar Susenas) dari beberapa komoditi tertentu. Hasil penghitungan dari data sekunder tersebut dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya. Penyesuaian (*adjustment*) yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan data indikator suplai untuk beberapa komoditas. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah langkah penghitungan PKRT sbb:

- Estimasi PKRT hasil Susenas;
- Terhadap data poin ke 1 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas untuk jenis pengeluaran tertentu;
- Data poin ke 2 dikelompokkan menjadi 7 kelompok COICOP;
- Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah di-*adjust*;
- Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat) dan 7 kelompok COICOP;
- PKRT adh konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke 4 dengan hasil poin ke 5;

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON-PROFIT YANG MELAYANI RUMAH TANGGA

i. Pendahuluan

Komponen konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai komponen tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Komponen ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumahtangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii. Konsep dan Definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumahtangga

Karakteristik unit LNP adalah sbb :

1. LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
2. pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
3. setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga.
4. kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
5. istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah

yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/ hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya.

Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

1. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
2. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya.
3. Penyusutan.
4. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Perhitungan PK – LNPRT Tahunan

1. Sumber data

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SK-LNP).
Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Hasil *up-dating* direktori LNPRT.
Informasi yang diperoleh dari hasil *up-dating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

2. Metode Perhitungan

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sbb :

enghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa).

Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenis-nya dihitung dengan rumus sbb:

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

$\bar{x}_{ij}$: Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

x_{ij} : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$

j : jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumusan sbb:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

X : PK-LNPRT adh Berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PK-LNPRTADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

i. Pendahuluan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lain-nya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang & jasa maupun aktivitas investasi

ii. Konsep dan Definisi

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sbb:

1. memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dsb. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidentil dari fungsi pokok unit pemerintah.
2. memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

iii. Cakupan

Komponen konsumsi pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Provinsi mencakup : a. PK-Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah provinsi; b. PK-Pemerintah Provinsi yang bersangkutan; c. PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Provinsi; d. PK-Pemerintah Desa/ Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah Provinsi bersangkutan

iv. Perhitungan PDRB Tahunan

1. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Provinsi Tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)

- b. Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu)
- c. Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- d. Output Bank Indonesia (BI)
- e. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementrian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

2. Metode Penghitungan

a. PK-P Provinsi adh Berlaku

Secara umum, PK-P adh Berlaku dihitung menggunakan rumusan berikut:

PK-P adh Berlaku = Output non pasar-penjualan barangdan jasa + output Bank Indonesia

Output **non-pasar dihitung** dengan pendekatan biaya yg dikeluarkan, yaitu : Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yg dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level Provinsi, PK-P Provinsi adh Berlaku, dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah Provinsi itu sendiri + pengeluaran akhir konsumsi pemerintah seluruh pemerintahan Kabupaten/ Kota yang ada di wilayah Provinsi tersebut+ pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah provinsi tersebut + pengeluaran pemerintah Pusat yang menjadi bagian dari Provinsi yang bersangkutan.

b. PK-P Provinsi adh Konstan

Pengeluaran konsumsi pemerintah adh Konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari

Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

2.4 PENGELUARAN MODAL TETAP BRUTO

i. Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya

ii. Konsep dan Definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di

dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode

iii. Cakupan

PMTB terdiri dari :

1. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagai-nya;
2. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya (seperti overall mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

iv. Perhitungan PMTB Tahunan

1. Sumber data
 - a. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Prov/Kab/Kota.
 - b. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
 - c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil & Rumah tangga (level provinsi).
 - d. Laporan keuangan perusahaan.
 - e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level provinsi.
 - f. IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.

- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas).
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum.
- i. Publikasi Statistik Konstruksi.
- j. Data Eksplorasi Mineral dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan

2. Metode penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “arus komoditas”. Dalam hal ini penyediaan atau “*supply*” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

a. Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (adh) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data

tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai adh berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB adh Konstan, maka PMTB adh Berlaku tersebut di “deflate” (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal

b. Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik adh Berlaku maupun adh Konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasi output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB adh Berlaku. Untuk memperoleh nilai adh Konstan adalah dengan men-*deflate* PMTB (adh Berlaku) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan ke dua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara “ekstrapolasi” atau mengalikan PMTB adh Konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB adh Konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB adh Berlaku, nilai PMTB adh Konstan tersebut di “reflate” (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang

sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB adh Konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara.

Pertama, PMTB adh Berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rician tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). *Ke dua*, untuk memperoleh PMTB adh Konstan adalah dengan cara men“deflate” PMTB adh Berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB adh Berlaku untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan adh Berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB adh Konstan-nya diperoleh dengan men-deflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunan-nya.

Untuk perangkat lunak, PMTB adh Berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang software. Untuk adh Konstan diperoleh dengan men-deflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data dikumpulkan adalah

nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB adh Konstan-nya diperoleh dengan cara mendeflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak-langsung (arus komoditas), yaitu:

- Rasio pengeluaran output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.
- Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

2.5 PERUBAHAN INVENTORI

i. Pendahuluan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal.

Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi

ii. Konsep dan Definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna pertambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja

iii. Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sbb :

1. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
2. Berbagai jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
3. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
4. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
5. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
6. Ternak untuk tujuan dipotong;
7. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
8. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum

iv. Perhitungan Perubahan Inventori Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah :

- a. Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- b. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD

- c. Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalan;
- d. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.
- e. Data komoditas perkebunan;
- f. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- g. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
- h. Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Ditjennak Kementan.

2. Metode Perhitungan

Terdapat 2 metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi “korporasi”, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”.

Di lihat dari sisi manfaat-nya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan

a. Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori adh berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sbb:

- menghitung posisi inventori adh Konstan, dengan cara mende~~flate~~flate stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;

- menghitung perubahan inventori adh Konstan dengan mengurangi posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- menghitung perubahan inventori adh Berlaku dengan menginflasi perubahan inventori adh Konstan dengan IHPB rata-rata tahunan

b. Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori adh Berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori adh Konstan dihitung dengan: a. mendeflate nilai perubahan inventori adh Berlaku dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah bahwa :

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harga-nya.
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara *me-mark-up*, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia

2.6 EKSPOR IMPOR

i. Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan jaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

ii. Konsep dan Definisi

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut

iii. Cakupan

Ekspor-Impor pada suatu wilayah terdiri dari:

1. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut
2. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut

Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya

- Net Ekspor antar daerah; Ekspor antar daerah dan Impor antar daerah

iv. Perhitungan Ekspor – Impor Tahunan

1. Sumber data

- a. Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)
- b. Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
- c. Neraca Pembayaran Indonesia dari BI
- d. Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
- e. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang;
- f. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei.
- g. Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia

2. Metode Penghitungan

Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga free on board (fob) dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented trasnsaction*) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.

<https://jemberkab.bps.go.id>

**TINJAUAN PEREKONOMIAN
BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN
TAHUN 2013-2017**

3

BAB III
PEREKONOMIAN KABUPATEN JEMBER
BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN TAHUN 2013-2017

Perubahan struktur ekonomi Kabupaten Jember akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2012 sampai dengan 2016, tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan antar daerah.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Jember digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian berikut:

3.1 TINJAUAN AGREGAT PDRB MENURUT PENGELUARAN

Setelah berlalunya masa krisis yang melanda ekonomi Indonesia dan dunia sejak tahun 2008, kondisi perekonomian Jember menunjukkan tanda pemulihan. Hal ini terlihat dari PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan arah positif. Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui nilai PDRB ADHB dan ADHK, serta pertumbuhan pada total PDRB.

**Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Jember
Tahun 2013-2017**

(Juta Rp)

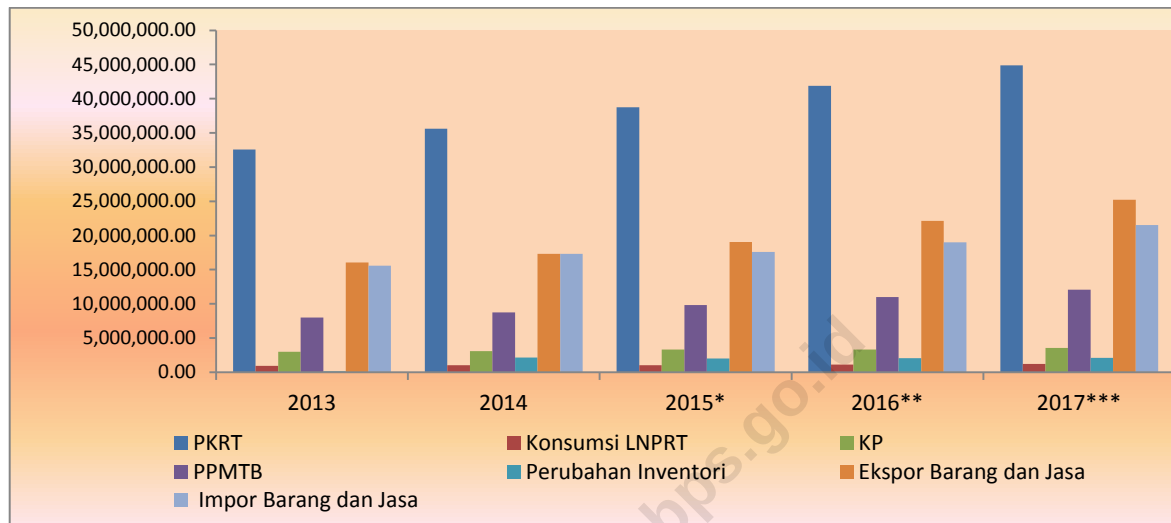
Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga/ <i>Household Consumption</i>	32,591,067.10	35,624,355.50	38,755,009.40	41,876,286.10	44,892,266.00
2. Konsumsi LNPRT/NPISH <i>Consumption</i>	903,822.11	1,017,133.46	1,042,069.33	1,134,388.43	1,199,749.32
3. Konsumsi Pemerintah/ <i>Government Consumption</i>	2,971,606.93	3,071,049.37	3,321,972.75	3,294,962.33	3,548,539.46
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/ <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	8,017,034.63	8,748,311.55	9,808,565.51	11,008,799.18	12,074,300.63
5. Perubahan Inventori/ <i>Changes of Inventory</i>	106,054.84	2,134,768.71	2,003,563.62	2,055,381.16	2,075,083.58
6. Ekspor/ <i>Export</i>	16,066,293.09	17,320,828.27	19,029,535.96	22,119,525.09	25,207,692.70
7. Impor/ <i>Import</i>	15,600,348.64	17,314,349.74	17,583,345.09	18,975,661.82	21,521,559.88
PDRB / <i>GRDP</i>	45,055,530.09	50,602,097.14	56,377,371.43	62,513,680.47	67,476,071.80

Keterangan : * angka sementara, ** sangat sementara

Pada periode tahun 2013–2017 PDRB Kabupaten Jember Atas Dasar Harga Berlakumeningkat cukup signifikan, yakni sebesar 22.420.541,7 Juta Rupiah; 4.055.530,1 Juta Rupiah (2014); 50.602.097,1 Juta Rupiah (2014); 56.377.371,4 Juta Rupiah (2015); 62.513.680,5 Juta Rupiah (2016); dan 67.476.071,8 Juta Rupiah (2017).Nilai PDRB Jemberadh Berlaku selama periode tahun 2013 sampai dengan 2017menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume.

Secara total, PDRB Kabupaten Jember Atas Dasar Harga Berlaku di tahun 2017 meningkat sebesar 49,76 persen, yakni dari 45.055.530,1 Juta Rupiah pada tahun 2013 menjadi 67.476.071,8 Juta Rupiah di tahun 2017.

Grafik 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Jember 2013– 2017



Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Jember Tahun 2013-2017

(Juta Rp)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga/ <i>Household Consumption</i>	27,915,560.3	29,473,588.8	30,880,763.1	32,260,423.1	33,755,256.7
2. Konsumsi LNPR/ <i>NPISH Consumption</i>	664,788.2	734,718.1	745,852.6	768,646.4	778,584.4
3. Konsumsi Pemerintah/ <i>Government Consumption</i>	2,360,033.8	2,426,691.1	2,484,637.0	2,304,053.3	2,391,337.7
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/ <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	7,259,365.4	7,621,883.0	8,158,677.6	8,582,200.6	9,067,737.0
5. Perubahan Inventori/ <i>Changes of Inventory</i>	42,433.7	1,154,565.9	1,004,337.1	999,218.7	1,005,413.8
6. Ekspor/ <i>Export</i>	14,186,753.6	14,652,161.5	15,524,990.3	16,896,172.4	18,304,148.6
7. Impor/ <i>Import</i>	12,909,701.5	14,091,930.0	14,576,693.3	15,277,154.5	16,389,518.4
PDRB / <i>GRDP</i>	39,519,233.5	41,971,678.4	44,222,564.4	46,533,560.0	48,912,959.8

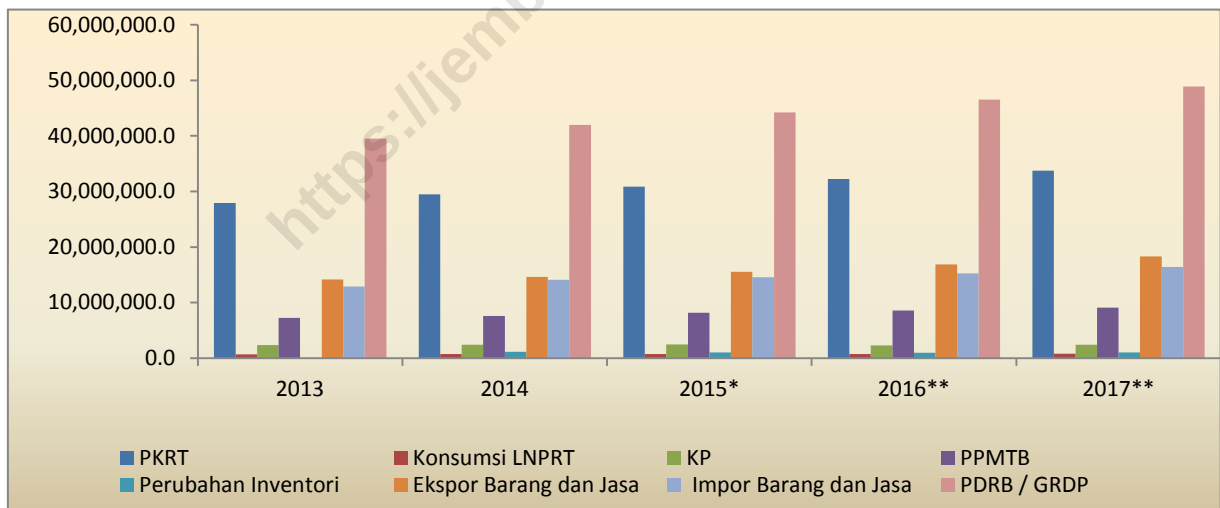
Keterangan : * angka sementara, ** sangat sementara

PDRB menurut pengeluaran selain dinilai atas dasar harga Berlaku juga dinilai adh Konstan 2010 atau adhk berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan adh konstan, PDRB di masing-masing tahun dapat

memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB komponen pengeluaran adh Konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2013-2017, gambaran tentang perkembangan ekonomi Jember berdasarkan PDRB adh Konstan dapat dilihat pada tabel 2 diatas. Sama halnya dengan PDRB adh Berlaku, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB adh Konstan juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

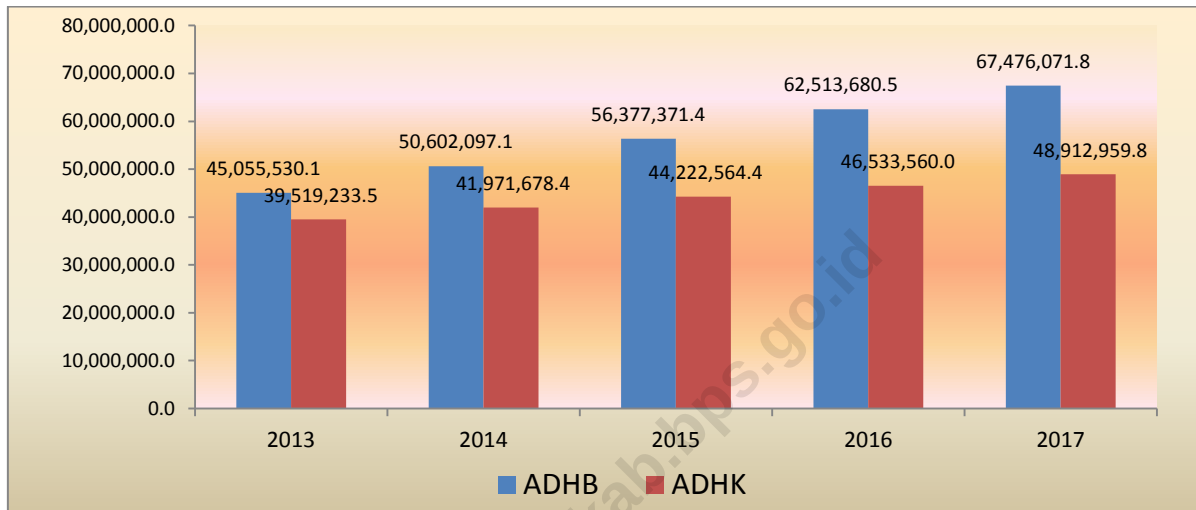
Dari grafik 2. di bawah, nampak bahwa pada umumnya nilai PDRB adh Berlaku selalu lebih besar dari nilai PDRB adh Konstan. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB adh Berlaku. Dalam PDRB adh Konstan pengaruh faktor harga telah ditiadakan

**Grafik 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran
Kabupaten Jember, Tahun 2013-2017**



Grafik 3. Perbandingan PDRB Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010, Kabupaten Jember 2013-2017

Figure 1. Comparing of GRDP by Expenditure at current price and GRDP at Constant Price 2010 , Jember Region, 2013-2017



Dari grafik 3, terlihat bahwa nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB atas dasar harga Konstan. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat. Sedangkan pada PDB atas dasar harga Konstan, pengaruh dari harga tersebut telah diabaikan. Sama halnya PDRB atas dasar harga Berlaku, sebagian besar pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga Konstan juga menunjukkan peningkatan.

**Tabel 3. Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran,
Kabupaten Jember Tahun 2013-2017**

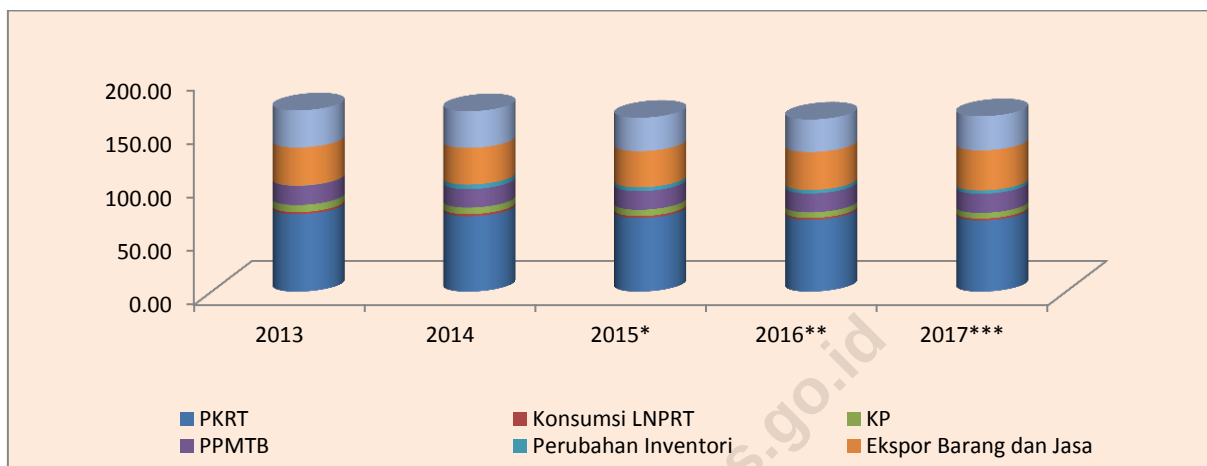
Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga/ <i>Household Consumption</i>	72.34	70.40	68.74	66.99	66.53
2. Konsumsi LNPRT/ <i>NPISH Consumption</i>	2.01	2.01	1.85	1.81	1.78
3. Konsumsi Pemerintah/ <i>Government Consumption</i>	6.60	6.07	5.89	5.27	5.26
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/ <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	17.79	17.29	17.40	17.61	17.89
5. Perubahan Inventori/ <i>Changes of Inventory</i>	0.24	4.22	3.55	3.29	3.08
6. Ekspor/ <i>Export</i>	35.66	34.23	33.75	35.38	37.36
7. Impor/ <i>Import</i>	34.62	34.22	31.19	30.35	31.90
PDRB / <i>GRDP</i>	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Keterangan : * angka sementara, ** sangat sementara

Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor minus impor barang dan jasa.

Dari tabel 3 terlihat bahwa selama periode 2013-2017, PDRB Kabupaten Jember, sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT). Pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar, yakni sekitar 17 s.d 18 persen. Meskipun komponen ekspor berkontribusi sekitar 33 s.d 37 persen, namun di sisi lain komponen impor sebagai komponen pengurang dalam PDRB juga masih berkontribusi relatif besar, yakni sekitar 30 s.d 35 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah atau bahkan luar negeri (impor).

**Grafik 4. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran,
Kabupaten Jember Tahun 2013 - 2017**



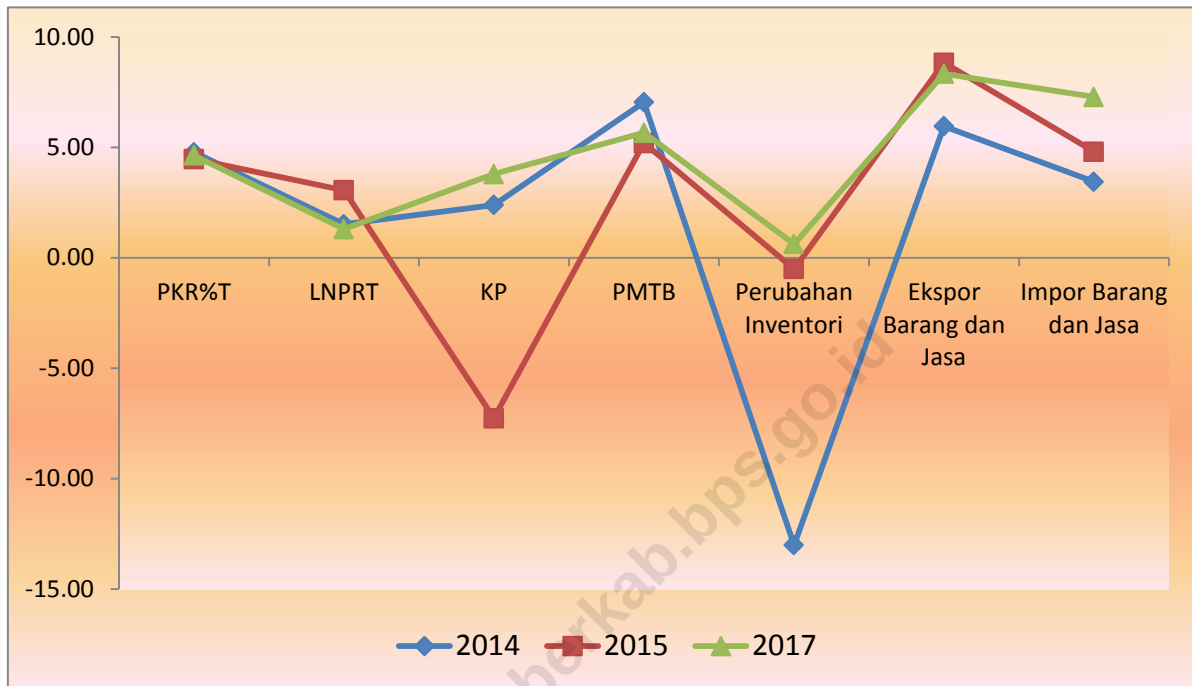
Kontribusi komponen konsumsi pemerintah (PK-P) berada pada rentang 5.0 – 7.0 persen. Hal tersebut menunjukkan peran pemerintah dalam menyerap PDRB tidak terlalu besar. Di sisi lain, pada tahun 2013-2017 perdagangan dengan luar wilayah yang direpresentasi oleh komponen ekspor dan impor, menunjukkan ekspor yang cenderung lebih tinggi dari impor. Kecenderungan pada periode itu selalu menunjukkan posisi “surplus” atau menguntungkan.

**Tabel 4. Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran,
Kabupaten Jember Tahun 2013-2017**

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Konsumsi Rumah Tangga/ <i>Household Consumption</i>	5.14	5.58	4.77	4.47	4.63
2. Konsumsi LNPRT/ <i>NPISH Consumption</i>	4.26	10.52	1.52	3.06	1.29
3. Konsumsi Pemerintah/ <i>Government Consumption</i>	6.48	2.82	2.39	-7.27	3.79
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/ <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	7.11	4.99	7.04	5.19	5.66
5. Perubahan Inventori/ <i>Changes of Inventory</i>	1,796.27	2,620.87	-13.01	-0.51	0.62
6. Ekspor/ <i>Export</i>	5.17	3.28	5.96	8.83	8.33
7. Impor/ <i>Import</i>	4.00	9.16	3.44	4.81	7.28
PDRB / <i>GRDP</i>	6.06	6.60	5.36	5.23	5.11

Keterangan : * angka sementara, ** sangat sementara

Grafik 5. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Jember 2015-2017



Pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) merupakan agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB, yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Jember dari tahun 2013 sampai dengan 2017 secara rata-rata mencapai 5.7 persen, dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 6,06 persen (2013); 6,60 persen (2014); 5,36 persen (2015); 5,23 persen (2016) dan 5,11 (2017). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yakni sebesar 6,60 persen, sebaliknya yang terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar (5,11 persen).

**Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran
Kabupaten Jember, Tahun 2013-2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga/ <i>Household Consumption</i>	116.75	120.87	125.50	129.81	132.99
2. Konsumsi LNPRT/NPISH <i>Consumption</i>	135.96	138.44	139.72	147.58	154.09
3. Konsumsi Pemerintah/ <i>Government Consumption</i>	125.91	126.55	133.70	143.01	148.39
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/ <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	110.44	114.78	120.22	128.27	133.16
5. Perubahan Inventori/ <i>Changes of Inventory</i>	249.93	184.90	199.49	205.70	206.39
6. Ekspor/ <i>Export</i>	113.25	118.21	122.57	130.91	137.72
7. Impor/ <i>Import</i>	120.84	122.87	120.63	124.21	131.31
PDRB / <i>GRDP</i>	114.01	120.56	127.49	134.34	137.95

Keterangan : * angka sementara, ** sangat sementara

Sementara itu, indeks implisit¹ PDRB menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri) juga menunjukkan peningkatan.

3.2 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. Data berikut menunjukan hal tersebut, dimana sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga.

¹ Indeks perkembangan

**Tabel 6. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Kabupaten Jember, Tahun 2013-2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (Juta Rupiah)	32,591,067.13	35,624,355.52	38,755,009.36	41,876,286.11	44,892,265.98
b. AD.HK (Juta Rupiah)	27,915,560.26	29,473,588.80	30,880,763.15	32,260,423.09	33,755,256.66
Proporsi terhadap PDRB					
ADHB)	72.34	70.40	68.74	66.99	66.53
Rata-rata konsumsi per-Rumah Tangga/tahun (Ribu Rp)					
a. ADHB	47,707.18	51,859.64	56,235.71	60,466.37	64,522.91
b. ADHK 2010	40,863.12	42,905.75	44,809.73	46,581.75	48,515.87
Rata-rata konsumsi per-kapita/tahun (Ribu Rp)					
a. ADHB	13,685.68	14,876.90	16,100.19	17,311.40	18,472.78
b. ADHK 2010	11,722.33	12,308.31	12,828.95	13,336.26	13,889.99
Pertumbuhan (%)					
a. Total konsumsi RT	5.14	5.58	4.77	4.47	4.63
b. Per-RT	4.61	5.00	4.44	3.95	4.15
c. Perkapita	4.61	5.00	4.23	3.95	4.15
Jumlah RT (unit)	683,148	686,938	689,153	692,555	695,757
Jumlah penduduk (org)	2,381,400	2,394,608	2,407,115	2,419,000	2,430,185

Keterangan : * angka sementara, ** sangat sementara

Tabel 6. di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2013-2017 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal maupun riil, sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2014 sampai

dengan 2017 selalu menurun. Titik tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu 72,34persen dan titik terendah terjadi pada tahun 2017 yaitu 66.53persen.

Masa pemulihan ekonomi telah mendorong rumah tangga untuk memperbaiki serta mengembalikan perilaku dan kebiasaan konsumsinya setelah sekian lama mengalami masa-masa krisis. Melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor) turut menjadi pemicu meningkatnya belanja untuk konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Secara umum, rata-rata konsumsi per rumah tangga terus meningkat dari tahun ke tahun, baik menurut *adh Berlaku* maupun *adh Konstan* 2010. Pada tahun 2013, secara umum setiap rumah tangga di Jember menghabiskan dana sekitar 56,158.36 ribu rupiah setahun untuk membiayai konsumsi baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dan sebagainya). Pengeluaran ini terus meningkat menjadi 47,707.18 ribu rupiah (2013); 51,859.64 ribu rupiah (2014); 56,235.71 ribu rupiah (2015); 60,466.37 ribu rupiah (2016); dan 64,522.91 ribu rupiah (2017).

Sementara itu, pada perkiraan *adh Konstan* 2010, rata-rata konsumsi rumah tangga per rumah tangga tumbuh pada di antara angka 3 sampai 5 persen dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 5.0 persen. Di sisi lain, rata-rata konsumsi per-kapita juga menunjukkan kecenderungan yang searah dengan kenaikan jumlah penduduk, dan selalu diikuti pula oleh kenaikan nilai konsumsinya. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per-kapita menunjukkan peningkatan, baik *adh Berlaku* maupun *adh Konstan* 2010. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk di Kabupaten Jember meningkat, baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas). Peningkatan rata-rata konsumsi per-kapita secara “riil” berkisar antara 3 sampai dengan 5.00 persen. Peningkatan ini secara otomatis berpengaruh terhadap perubahan struktur konsumsi rumah tangga.

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga *adh Konstan* meningkat dari 5.14 persen di tahun 2013 menjadi sebesar 5.58 persen (2014) dan menurun pada tahun 2015

menjadi 4.77 persen., menurun kembali mejadi 4.47 persen pada 2016 . Namun pada tahun berikutnya pada tahun 2017 meningkat menjadi 4.63persenSementara itu, pertumbuhan konsumsi per-kapita selaras dengan adh Konstan dimana meningkat dari 4.61 persen pada tahun 2013 menjadi sebesar 5.00 persen pada tahun 2014 kemudian di tahun 2015meningkat menjadi 4.23 persen dan meningkat lagi menjadi 3.95 di tahun 2016 dan menjadi 4.15 pada tahun 2017. Nampak bahwa peningkatan keseluruhan konsumsi rumah tangga secara “riil” lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk yang umumnya berada di bawah 2 persen. Hal ini mengindikasikan terjadi perubahan tingkat kemakmuran masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data PDRB ini.

**Tabel 7. Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Kabupaten Jember, Tahun 2013- 2017**

					Persentase (%)
Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	43.41	42.18	41.68	41.39	41.28
b. Pakaian dan Alas Kaki	3.51	3.42	3.28	3.24	3.25
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah	9.54	9.60	9.59	9.46	9.44
d. Kesehatan dan Pendidikan	8.43	8.58	9.00	8.99	9.02
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	22.10	22.91	22.93	23.38	23.61
f. Hotel dan Restoran	8.65	8.87	9.18	9.13	9.01
g. Lainnya	4.35	4.45	4.35	4.41	4.39
Total Konsumsi Rumah Tangga	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Keterangan : * angka sementara, ** sangat sementara

Secara rata-rata dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, nampak pada struktur konsumsi akhir rumah tangga Jember, bahwa konsumsi bukan makanan lebih tinggi dibandingkan konsumsi makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan dari tahun ke tahun selalu menurun. Proporsi untuk makanan pada masing-masing tahun mencapai 43.41

persen (2013) ; 42.18 persen (2014) ; 41.68 persen (2015) ; 41.39 persen (2016); dan 41.28 persen (2017).

Pola proporsi konsumsi di atas, menunjukkan tarik menarik antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan yang masih cukup kuat. Sungguhpun demikian, pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya.

Tabel 8. Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Jember, Tahun 2013-2017

Uraian	Persentase (%)				
	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	4.80	4.65	3.14	3.75	4.51
b. Pakaian dan Alas Kaki	6.63	5.01	3.45	3.43	3.98
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah	2.53	3.62	6.38	4.98	4.31
d. Kesehatan dan Pendidikan	6.87	8.10	7.16	5.12	4.78
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	5.41	7.16	6.41	5.79	5.58
f. Hotel dan Restoran	5.86	6.16	5.36	4.08	3.85
g. Lainnya	6.80	5.16	3.88	3.32	3.05

Keterangan : * angka sementara, ** sangat sementara

Dilihat dari pertumbuhan “riil” nya, pengeluaran rumah tangga untuk kelompok makanan, minuman dan rokok selalu mengalami perlambatan dari tahun ke tahun, dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 4.80 persen (2013) ; 4.65 persen (2014) ; 3.14 persen (2015) ; 3.75 persen (2016) dan 4.51 persen (2017). Demikian juga di kelompok

konsumsi Pakaian dan Alas Kaki; Kesehatan dan Pendidikan; Lainnya juga mengalami perlambatan sepanjang tahun. Sedangkan kelompok konsumsi lainnya mengalami besaran pertumbuhan yang fluktuatif. Di antara seluruh kelompok konsumsi, yang mengalami pertumbuhan tertinggi selama lima tahun terakhir adalah Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya yang tumbuh 7.16 persen dan terjadi di tahun 2014, sedangkan pertumbuhan terendah dialami kelompok Lainnya yang pada tahun 2017 tumbuh sebesar 3.05 persen.

Tabel 9. Perubahan Indeks Harga Implisit Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga Kabupaten Jember, Tahun 2013 – 2017 (Persen)

Uraian		2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a.	Makanan, Minuman, dan Rokok	3.31	1.48	4.24	3.41	2.30
b.	Pakaian dan Alas Kaki	0.48	1.34	0.74	3.47	3.35
c.	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah	6.11	6.10	2.14	1.60	2.54
d.	Kesehatan dan Pendidikan	2.68	2.90	6.39	2.68	2.72
e.	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	4.11	5.74	2.32	4.16	2.53
f.	Hotel dan Restoran	3.23	5.52	6.92	3.23	1.89
g.	Lainnya	3.11	6.27	2.43	5.97	3.56

Keterangan : * angka sementara, ** sangat sementara

3.3 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Konsumsi akhir LNPRT peranannya dalam PDRB menurut pengeluaran sangat kecil dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah semestinya dapat lebih ditingkatkan lagi. Data berikut menunjukan hal tersebut, dimana hal tersebut dapat dilihat dari proporsinya terhadap PDRB.

**Tabel 10. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi LNPRT
Kabupaten Jember, Tahun 2013-2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (Juta Rp)	903,822.11	1,017,133.46	1,042,069.33	1,134,388.43	1,199,749.32
b.. ADHK 201 (Juta Rp)	664,788.22	734,718.06	745,852.57	768,646.37	778,584.36
Proporsi terhadap PDRB % ADHB)	2.01	2.01	1.85	1.81	1.78

Keterangan : * angka sementara, ** sangat sementara

Selama periode tahun 2013-2017 konsumsi LNPRT baik secara adh Berlaku maupun adh Konstan 2010 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2013 konsumsi LNPRT adh Berlaku sebesar 903,822.11 Juta Rupiah kemudian meningkat menjadi 1,017,133.46 Juta Rupiah (2014), 1,042,069.33 Juta Rupiah (2015), 1,134,388.43 Juta Rupiah (2016) dan 1,199,749.32 Juta rupiah (2017). Demikian juga dengan konsumsi LNPRT secara adh Konstan yaitu sebesar 664,788.22 Juta Rupiah pada tahun 2013 dan selanjutnya meningkat hingga sebesar 778,584.36 Juta Rupiah pada tahun 2017. Jika dilihat lebih lanjut proporsi konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) walaupun mengalami peningkatan selama periode 2013-2017, namun merupakan komponen yang relatif kecil kontribusinya dalam pengeluaran produk domestik regional bruto yaitu pada kisaran 2 persen.

3.4 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Konsumsi akhir pemerintah ditambah pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Kabupaten Jember serta bagaimana perkembangannya dijelaskan dalam uraian dibawah ini.

**Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah
Kabupaten Jember, Tahun 2013-2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (Juta Rp)	2,971,606.93	3,071,049.37	3,321,972.75	3,294,962.33	3,548,539.46
b. ADHK 2010 (Juta Rp)	2,360,033.76	2,426,691.11	2,484,636.95	2,304,053.31	2,391,337.70
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	6.60	6.07	5.89	5.27	5.26

Keterangan : * angka sementara, ** sangat sementara

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah secara total tahun 2013-2017 menunjukkan peningkatan baik untuk adh Berlaku maupun adh Konstan 2010, sedangkan tahun 2017 pengeluaran konsumsi pemerintah baik adh Berlaku maupun Konstan 2010 meningkat dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah adh Berlaku sebesar 2,971,606.93 Juta Rupiah, kemudian meningkat terus hingga pada tahun 2017 nilainya mencapai 3,548,539.46 JutaRupiah. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah adh Konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan pada tahun 2013-2017 .

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB mengalami fluktuasi, dari 6.60 persen di tahun 2013, 6.07persen di tahun 2014, 5.89 persen pada tahun 2015, 5.27 persen pada tahun 2016, dan 5.26 persen pada tahun 2017. Sepanjang periode tersebut, proporsi terendah terjadi pada tahun 2017; sedangkan proporsi tertinggi pada tahun 2013 yang mencapai 6.60 persen

3.5 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)². Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun pemerintah), PMTB juga menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun riil. Proporsi non bangunan terhadap total PMTB relatif berfluktuasi selama periode 2013-2017 (tabel 11). Perubahan yang terjadi pada proporsi tersebut tidak lepas dari pengaruh pertumbuhan yang terjadi pada masing-masing sub komponen PMTB tersebut. Proporsi sub komponen bangunan terhadap total PMTB relatif stabil di kisaran 88 persen selama periode tahun 2013-2017.

Sementara jika dilihat pertumbuhannya, secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2013-2017 fluktuatif, menurun dari 7.11 persen (2013) menjadi 4.99 persen (2014) kemudian meningkat 7.04 persen (2015) menjadi 5.19 persen (2016) dan kembali meningkat menjadi 5.66 persen (2017). . Pertumbuhan PMTB pada masing-masing komponen sangat bervariasi antar tahunnya. Pertumbuhan sub komponen bangunan menunjukkan pola yang variatif antar tahunnya. Pada tahun 2013 pertumbuhan sub komponen bangunan sebesar 7.96 persen kemudian mengalami kontraksi pada tahun 2014 menjadi 5.07 persen. Namun pada tahun 2015 meningkat hingga pertumbuhannya mencapai 7.15 persen, tahun 2016 mencapai 5.49 persen dan pada tahun 2017 kembali mengalami kenaikan menjadi 5.70 persen. Sedangkan Non Bangunan mengalami pertumbuhan yang terus meningkat pada tahun 2013-2017, sebesar 2.27 persen (2013); 4.53 persen (2014); 6.40 persen (2015); 3.36 persen (2016) dan 5,39 persen (2017).

² Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

**Tabel 12. Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Jember,
Tahun 2013-2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
ADHB (Juta Rupiah)	8,017,034.63	8,748,311.55	9,808,565.51	11,008,799.18	12,074,300.63
ADHK (Juta Rupiah)	7,259,365.44	7,621,883.02	8,158,677.57	8,582,200.63	9,067,737.03
Proporsi terhadap PDRB (%)	17.79	17.29	17.40	17.61	17.89
Struktur PMTB					
Bangunan (Juta Rp)	6,924.92	7,547.37	8,457.52	9,575.74	10,505.45
Bangunan (%)	0.10	0.10	0.10	0.11	0.12
Non Bangunan (Juta Rupiah)	1,092.11	1,200.94	1,351.04	1,433.06	1,568.85
Non Bangunan (%)	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Total PMTB (Juta Rp)	7,259,365.44	7,621,883.02	8,158,677.57	8,582,200.63	9,067,737.03
Bangunan	7.96	5.07	7.15	5.49	5.70
Non Bangunan	2.27	4.53	6.40	3.36	5.39
Total	7.11	4.99	7.04	5.19	5.66

Keterangan : * angka sementara, ** sangat sementara

3.6 PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “persediaan” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa

distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

**Tabel 13. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori
Kabupaten Jember, Tahun 2013-2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (Juta Rp)	106,054.84	2,134,768.71	2,003,563.62	2,055,381.16	2,075,083.58
b. ADHK 2010 (Juta Rp)	42,433.65	1,154,565.90	1,004,337.13	999,218.67	1,005,413.83
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	0.24	4.22	3.55	3.29	3.08

Keterangan : * angka sementara, ** sangat sementara

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah, bahwa proporsi dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

Pada Tahun 2013 perubahan inventori sebesar 106,054.84 Juta Rupiah, kemudian tahun 2014 perubahan inventori nilainya sebesar 2,134,768.71 Juta Rupiah dan pada tahun berikutnya menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 2,003,563.62 Juta Rupiah (2015); 2,055,381.16 Juta Rrupiah (2016) dan 2,075,083.58 Juta Rupiah (2017). Sedangkan bila dicermati proporsinya dalam PDRB, Total inventori ini memiliki besaran yang berfluktuasi dari tahun 2013-2017. Pada tahun 2013 mempunyai porsi sebesar 0,24 persen di dalam PDRB dan di tahun berikutnya (2014) peranannya meningkat cukup besar menjadi 4,22 persen. Kemudian menurun di tahun 2015 yang mempunyai porsi sebesar 3,55 persen dan terus menurun pada tahun 2016 naik menjadi 3.29 persen dan menurun kembali menjadi 3.08 persen.pada tahun 2017

3.7 PERKEMBANGAN EKSPOR BARANG DAN JASA

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik, tetapi dikonsumsi oleh pihak luar kabupaten, baik secara langsung maupun tidak langsung.

**Tabel 14. Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa
Kabupaten Jember, Tahun 2013-2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor					
a. ADHB (<i>Juta Rp</i>)	16,066,293.09	17,320,828.27	19,029,535.96	22,119,525.09	25,207,692.70
b. ADHK 2010 (<i>Jutar Rp</i>)	14,186,753.61	14,652,161.53	15,524,990.29	16,896,172.38	18,304,148.64
Proporsi Thd PDRB (% ADHB)	35.66	34.2	33.8	35.4	37.4
Pertumbuhan Ekspor (%)	5.17	3.28	5.96	8.83	8.33

Keterangan : * angka sementara, ** sangat sementara

Secara total, nilai ekspor tahun 2017 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 nilai ekspor sebesar 16,066,293.09 Juta Rupiah dan tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi sebesar 17,320,828.27 Juta Rupiah. Tahun 2015 ekspor meningkat menjadi sebesar 19,029,535.96 Juta Rupiah. Pada tahun berikutnya, nilai ekspor meningkat lagi sehingga menjadi sebesar 22,119,525.09 Juta Rupiah (2016), dan 25,207,692.70 Juta Rupiah pada tahun 2017. Sejalan dengan nilai ekspor adh Berlaku, nilai ekspor adh Konstan 2010 juga menunjukan arah pertumbuhan yang sama, yaitu dari tahun 2013-2017 selalu meningkat dengan nilai "riil" masing-masing tahun sebesar 14,186,753.61 Juta Rupiah (2013); 14,652,161.53 Juta Rupiah (2014); 15,524,990.29 Juta Rupiah (2015); 16,896,172.38 Juta Rupiah pada tahun 2016 ; dan 18,304,148.64 Juta Rupiah pada tahun 2017.

Dari sisi pertumbuhan, kuantitas ekspor komoditas barang dan jasa dari Kabupaten Jember ke luar daerah dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi walaupun masih selalu

tumbuh negatif dari tahun 2013-2015, dari besarnya pertumbuhan 5.17 persen di tahun 2013 hingga menjadi 3.28 persen di tahun 2014 dan menjadi 5.96 persen pada tahun 2015.. Akan tetapi pada tahun 2016 dan 2017 mengalami pertumbuhanyaitu masing-masing sebesar 8.83 dan 8.33 persen.

3.8 PERKEMBANGAN IMPOR BARANG DAN JASA

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Jember. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitunganyaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB (e) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongan-nya bisa berbeda dengan ekspor.

**Tabel 15. Perkembangan Impor Barang dan Jasa
Kabupaten Jember, Tahun 2013-2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Impor					
a. ADHB (<i>Juta Rp</i>)	15,600,348.64	17,314,349.74	17,583,345.09	18,975,661.82	21,521,559.88
b. ADHK 2010 (<i>Juta Rp</i>)	15,600,348.64	17,314,349.74	17,583,345.09	18,975,661.82	21,521,559.88
Pertumbuhan Nilai Impor (%)	4.00	9.16	3.44	4.81	7.28

Keterangan : * angka sementara, ** sangat sementara

Tabel 15. di atas menunjukkan pola perkembangan impor Jember pada periode tahun 2013 sampai dengan 2017 yang selalu meningkat (baik adh Berlaku maupun adh Konstan 2010), nilai impor sebesar 15,600,348.64 Juta Rupiah pda tahun 2013, sebesar 17,314,349.74 Juta Rupiah tahun 2014. Pada tahun-tahun berikutnya nilai impor mengalami penurunan dari 17,583,345.09 Juta Rupiah (2015) menjadi 18,975,661.82 Juta Rupiah (2016), kemudian meningkat menjadi 21,521,559.88 Juta Rupiah (2017) .

Dari sisi pertumbuhan, secara riil nilai impor mengalami pertumbuhan yang signifikan pada tahun 2013 sebesar 4.00 persen, pada 2014 meningkat menjadi 9.16 persen Kembali melambat pada tahun 2015 menjadi 3.44 persen, dan meningkat kembali sebesar 4.81 persen pada tahun 2016 dan menjadi 7.28 persen pada tahun 2017.

3.9 PERKEMBANGAN NET EKSPOR ANTAR DAERAH

Net ekspor antar daerah didefinisikan sebagai ekspor antar daerah dikurangi impor antar daerah. Berbeda dengan penghitungan ekspor-impor barang dan jasa luar negeri, pada penghitungan ekspor-impor antar daerah tidak tersedia sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang yang terjadi dalam transaksi tersebut. Keberadaan data dengan kondisi seperti ini menyebabkan penghitungan ekspor-impor antar provinsi menjadikan komponen ini (dalam series PDRB adh Konstan 2010) diperlakukan sebagai item penyeimbang (residual), yakni perbedaan antara total PDRB menurut pengeluaran dengan total PDRB menurut lapangan usaha. Ketersediaan data yang ada lebih sesuai untuk dimanfaatkan sebagai informasi pendukung.

Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu: ekspor antar daerah dan impor antar daerah. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor antar daerah juga hasilnya dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda

“**positif**” berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar dari pada impor antar daerah, demikian pula sebaliknya.

Pada saat ini untuk memisahkan net ekspor antar daerah menjadi nilai ekspor antar daerah dan nilai impor antar daerah dilakukan dengan metode tidak langsung, yaitu dengan metode *cross hauling*. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan sifat keseimbangan permintaan (*demand*) dan penyediaan (*supply*) setiap komoditas di suatu perekonomian. Penghitung ekspor impor dengan metode *cross-hauling* diawali dengan metode *commodity balance*. Metode *commodity balance* adalah metode penghitungan ekspor-impor dengan memanfaatkan Tabel Input-Output “bayangan”. Dalam metode ini, transaksi ekspor-impor dipandang sebagai item penyeimbang (*balancing item*) dalam keseimbangan *demand* dan *supply* suatu perekonomian

<https://jemberkab.bps.go.id>

**PERKEMBANGAN AGREGAT
PDRBPENGELUARAN
TAHUN 2013-2017**

4

BAB IV
PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB PENGELUARAN
TAHUN 2013-2017

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PDRB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 NOMINAL PDRB

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, maka disajikan data PDRB perkapita

Tabel 15. menunjukkan peningkatan PDRB per-kapita Kabupaten Jember dari tahun ke tahun yang seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Jember rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut.

Sementara itu pertumbuhan per-kapita secara “riil” juga selalu meningkat pada kisaran 5 - 6persen. Pertumbuhan tersebut diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk, yang meningkat rata-rata 0,06persen setiap tahunnya. Dengan demikian maka pertumbuhan per-kapita tersebut tidak saja terjadi secara “riil” tetapi juga terjadi secara kualitas.

**Tabel 16. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita
Kabupaten Jember, Tahun 2013-2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Juta Rp)					
-ADHB	45,055,530.09	50,602,097.14	56,377,371.43	62,513,680.47	67,476,071.80
- ADHK 2010	39,519,233.47	41,971,678.44	44,222,564.36	46,533,559.96	48,912,959.78
PDRB perkapita (Ribu Rp)					
-ADHB	18,919.77	21,131.68	23,421.14	25,842.78	27,765.82
-ADHK 2010	16,594.96	17,527.58	18,371.60	19,236.69	20,127.26
Pertumbuhan PDRB perkapita					
ADHK 2010 (%)	6.77	6.24	5.70	5.82	5.50
Penduduk					
- Jumlah (000 org)	2,381,400	2,394,608	2,407,115	2,419,000	2,430,185
- Pertumbuhan (%)	0.59	0.55	0.52	0.49	0.46

Keterangan : * angka sementara, ** sangat sementara

4.2 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP EKSPOR

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara produk yang dikonsumsi RT di wilayah domestik dengan produk yang diekspor. Selama ini konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi yang sangat dominan dalam pengeluaran PDRB Jember (sekitar 70 persen), yang artinya bahwa seluruh produk yang dihasilkan di wilayah Jember sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Namun di dalamnya termasuk pula sebagian produk yang berasal dari impor

Data pada tabel 17. Dibawah ini menunjukkan bahwa pada tahun 2013, produk yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga sebanyak 1.96 kali dari yang diekspor. Ini berarti bahwa sebagian besar penyediaan (*supply*) domestik diserap untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir rumah tangga. Selama periode 2013-2017, rasio perbandingan konsumsi rumah tangga terhadap ekspor menunjukkan fluktuasi. Secara implisit data tersebut menjelaskan, walaupun nilai konsumsi akhir rumah tangga dan ekspor mengalami fluktuasi

namun peningkatan nilai ekspor jauh lebih cepat. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh perubahan volume maupun harga. Selain itu, penurunan rasio tersebut juga disebabkan oleh perbedaan pertumbuhan ekspor yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

Tabel 17. Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Juta Rp)	32,591,067.13	35,624,355.52	38,755,009.36	41,876,286.11	44,892,265.98
Total Ekspor (ADHB) (Juta Rp)	16,066,293.09	17,320,828.27	19,029,535.96	22,119,525.09	25,207,692.70
Perbandingan Konsumsi RT terhadap Ekspor	2.03	2.06	2.04	1.89	1.78

Keterangan : * angka sementara, ** sangat sementara

4.3 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap). Sekilas nampak bahwa sebagian besar pengeluaran produk yang tersedia di wilayah domestik Indonesia digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

Tabel 18. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Juta Rp)	32,591,067.13	35,624,355.52	38,755,009.36	41,876,286.11	44,892,265.98
Total PMTB (ADHB) (Juta Rp)	8,017,034.63	8,748,311.55	9,808,565.51	11,008,799.18	12,074,300.63
Perbandingan Konsumsi RT thd PMTB	4.07	4.07	3.95	3.80	3.72

Keterangan : * angka sementara, ** sangat sementara

Berbeda halnya terhadap ekspor, rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB cenderung fluktuatif, dari sebesar 4.07 pada tahun 2013 menjadi 4.07 pada tahun 2014. Pada tahun-tahun berikutnya rasionya cenderung menurun secara lambat sebesar 3.95 (2015), 3.80 (2016), dan 3.27 (2017). Pada tahun 2017 perbandingan konsumsi RT dan PMTB menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena nilai investasi cenderung melambat, sementara konsumsi akhir rumah tangga mengalami percepatan.

4.4 PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah pengeluaran berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Tabel 19. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Jember, Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir ADHB (Juta Rp)					
a. Rumah tangga	32,591,067.13	35,624,355.52	38,755,009.36	41,876,286.11	44,892,265.98
b. LNPRT	903,822.11	1,017,133.46	1,042,069.33	1,134,388.43	1,199,749.32
c. Pemerintah	2,971,606.93	3,071,049.37	3,321,972.75	3,294,962.33	3,548,539.46
Jumlah	36,466,496.17	39,712,538.35	43,119,051.44	46,305,636.87	49,640,554.76
PDRB ADHB (Juta Rp)	45,055,530.09	50,602,097.14	56,377,371.43	62,513,680.47	67,476,071.80
Proporsi	88.87	89.87	90.87	91.87	92.87

Keterangan : * angka sementara, ** sangat sementara

Sebagian besar barang dan jasa yang berada di wilayah domestik digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (lebih dari 80 persen). Konsumsi akhir makin meningkat setiap tahunnya dari sebesar 36,466,496.17 Juta Rupiah di tahun 2013 menjadi

sebesar 49,640,554.76 Juta Rupiah di tahun 2017, atau selama kurun waktu lima tahun tersebut ada peningkatan konsumsi akhir sebesar 26,54 persen. Proporsinya terhadap PDRB semakin mengalami peningkatan dari 88,87 persen di tahun 2013, meningkat menjadi 92.87 persen di tahun 2017. Dalam hal ini, produk yang tidak digunakan menjadi konsumsi akhir (PMTB atau ekspor) memiliki peran besar.

4.5 PERBANDINGAN EKSPOR TERHADAP PMTB

Ekspor merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik, tetapi diperdagangkan ke luar negeri. Untuk menghasilkan produk yang diekspor kemungkinan besar menggunakan kapital (PMTB). Sementara di sisi lain sebagian barang yang diekspor bisa pula berupa barang kapital. Rasio ekspor terhadap PMTB dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai produk ekspor dengan nilai produk yang menjadi kapital (PMTB).

Tabel 20. Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB) Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ekspor (ADHB) (Juta Rp)	16,066,293.09	17,320,828.27	19,029,535.96	22,119,525.09	25,207,692.70
Total PMTB (ADHB) (Juta Rp)	8,017,034.63	8,748,311.55	9,808,565.51	11,008,799.18	12,074,300.63
Rasio Ekspor terhadap PMTB	2.00	1.98	1.94	2.01	2.09

Keterangan : * angka sementara, ** sangat sementara

Selama tahun 2013-2017, ekspor mempunyai nilai yang lebih tinggi dari PMTB akan tetapi rasio ekspor terhadap PMTB menurun tahun 2013 hingga 2015, kemudian meningkat di tahun 2016 dan 2017, peningkatan dari tahun 2016 sebesar 2.01 persen menjadi 2.09 pada tahun 2017. Untuk menghasilkan seluruh produk domestik (termasuk ekspor) disyaratkan tersedianya sejumlah kapital (yang di dalamnya termasuk pula kapital impor).

Peningkatan rasio tersebut di antaranya disebabkan oleh kenaikan ekspor yang relatif lebih pesat dibandingkan dengan kenaikan PMTB

4.6 PERBANDINGAN PDRB TERHADAP IMPOR

Rasio ini memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang berasal dari impor. Selain itu data tersebut menjelaskan tentang ketergantungan PDRB terhadap produk yang dihasilkan oleh negara lain. Jika rasionya kecil berarti ketergantungan akan impor semakin tinggi, dan sebaliknya.

**Tabel 21. Rasio PDRB terhadap Impor
Kabupaten Jember Tahun 2013-2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHB) (<i>Jutar Rp</i>)	45,055,530.09	50,602,097.14	56,377,371.43	62,513,680.47	67,476,071.80
Total Impor (ADHB) (<i>Juta Rp</i>)	15,600,348.64	17,314,349.74	17,583,345.09	18,975,661.82	21,521,559.88
Rasio PDRB terhadap Impor	2.89	2.92	3.21	3.29	3.14

Keterangan : * angka sementara, ** sangat sementara

Pada Tabel 21. menunjukkan rasio PDRB terhadap impor selama tahun 2013-2017 cenderung stabil. Pada tahun 2013 sebesar 2.89 kemudian menurun menjadi 2.92 pada tahun 2014, dan kembali meningkat tahun 2015 ; 2016 yaitu sebesar 3.21 dan 3.29 dan tahun 2017 yaitu sebesar 3.14. Peningkatan rasio dari tahun 2013–2017 menunjukkan berkurangnya ketergantungan PDRB terhadap produk impor dari tahun ke tahun.

4.7 KESEIMBANGAN TOTAL PENYEDIAAN DAN TOTAL PERMINTAAN

Rasio ini dapat menunjukkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi suatu daerah oleh produk yang berasal dari impor. Ketergantungan (ketidakseimbangan) tersebut dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (*supply*) dengan total permintaan akhir (*demand*).

**Tabel 22 Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan
Kabupaten Jember, Tahun 2013-2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Penyediaan					
PDRB ADHB (Juta Rp)	45,055,530.09	50,602,097.14	56,377,371.43	62,513,680.47	67,476,071.80
%	74.28	74.51	76.23	76.71	75.82
Total nilai Impor ADHB (Juta Rp)	15,600,348.64	17,314,349.74	17,583,345.09	18,975,661.82	21,521,559.88
%	25.72	25.49	23.77	23.29	24.18
Total Permintaan Akhir (Juta Rp)	60,655,878.73	67,916,446.88	73,960,716.53	81,489,342.29	88,997,631.68

Keterangan : * angka sementara, ** sangat sementara

Dari tabel 21. tersebut diatas, dapat dilihat bahwa untuk memenuhi permintaan akhir domestik, sebagian produk masih harus didatangkan dari luar negeri dan luar daerah, dengan rentang 23 sampai dengan 25 persen. Dengan kata lain, kebutuhan masyarakat baru bisa dipenuhi sekitar 70 persen dari selisih hasil produksi domestik. Dalam kurun waktu tersebut, tendensi permintaan (akhir) masyarakat terus meningkat setiap tahunnya, dari 60,655,878.73 Juta Rupiah (2013) menjadi sebesar 88,997,631.68 Juta Rupiah (2017).

Di sisi lain “penyediaan” produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh ekonomi domestik masing-masing sebesar 45,055,530.09 Juta rupiah (2013); 50,602,097.14 Juta Rupiah (2014); 56,377,371.43 Juta Rupiah (2015); 62,513,680.47 Juta Rupiah (2016) dan 67,476,071.80 Juta Rupiah (2017)., karena produk domestik tidak mampu mencukupi seluruh kebutuhan permintaan. Berbagai produk barang dan jasa diimpor, dengan nilai

masing-masing tahun sebesar 15,600,348.64 Juta Rupiah (2013); 17,314,349.74 Juta Rupiah (2014); 17,583,345.09 Juta Rupiah (2015); 18,975,661.82 Juta Rupiah (2016); dan 21,521,559.88 Juta Rupiah (2017).

4.8 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO(ICOR)

"**ICOR**" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit.

Formula:

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Di mana : I_t = PMTB tahun ke t
 Y_t = Output tahun ke t
 Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

**Tabel 23. *Incremental Capital Output Ratio,*
KabupatenJember, 2013-2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010) (Juta rupiah)	39,519,233.5	41,971,678.4	44,222,564.4	46,533,560.0	48,912,959.8
Perubahan (Juta rupiah)	2,257,272.72	2,452,444.90	2,250,886.00	2,310,995.60	2,379,399.80
PMTB (ADHK 2010) (Juta Rp)	7,259,365.4	7,621,883.0	8,158,677.6	8,582,200.6	9,067,737.0
ICOR	3.22	3.11	3.62	3.71	3.81

Keterangan : * angka sementara, ** sangat sementara

Data pada Tabel 23 menunjukkan besaran ICOR terus mengalami peningkatan dari 3.22 pada tahun 2013 menjadi 3.11 pada tahun 2014, kemudian meningkat lagi pada tahun 2015 menjadi 3.62 Pada tahun 2016 besaran ICOR sedikit meningkat dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu sebesar 3.71. dan pada tahun 2017 juga terjadi peningkatan menjadi sebesar 3.81.

<https://jemberkab.bps.go.id>

PENUTUP

5

BAB V

PENUTUP

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2013 sampai dengan 2017 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Jember pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku pengeluaran barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2013 sampai dengan 2017, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dan sebagainya) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data

ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana.

5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar negeri (*external account*) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor, dan transfer berjalan (*current tranfer*) neto. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kabupaten Jember terhadap ekonomi daerah lain (*rest of the world*).

<https://jemberkab.bps.go.id>

<https://jemberkab.bps.go.id>

LAMPIRAN

**Lampiran 1 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jember Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah), 2013-2017**

Komponen Pengeluaran		2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	32,591,067.13	35,624,355.52	38,755,009.36	41,876,286.11	44,892,265.98
	1.a. Makanan, Minuman dan Rokok	14,147,136.70	15,025,159.88	16,154,358.15	17,332,088.86	18,530,138.60
	1.b. Pakaian dan Alas Kaki	1,144,807.56	1,218,212.02	1,269,505.95	1,358,671.55	1,460,047.07
	1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah	3,109,792.05	3,418,796.25	3,714,867.61	3,962,209.77	4,238,060.21
	1.d. Kesehatan dan Pendidikan	2,748,886.13	3,057,778.84	3,486,072.73	3,762,762.04	4,049,761.75
	1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	7,202,231.08	8,160,511.45	8,885,210.77	9,790,540.10	10,598,258.43
	1.f. Hotel dan Restoran	2,819,302.74	3,158,254.32	3,557,871.88	3,822,775.76	4,044,648.54
	1.g. Lainnya	1,418,910.86	1,585,642.76	1,687,122.28	1,847,238.03	1,971,351.39
2	Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga	903,822.11	1,017,133.46	1,042,069.33	1,134,388.43	1,199,749.32
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,971,606.93	3,071,049.37	3,321,972.75	3,294,962.33	3,548,539.46
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	8,017,034.63	8,748,311.55	9,808,565.51	11,008,799.18	12,074,300.63
	4.a. Bangunan	6,924,924.63	7,547,368.11	8,457,522.00	9,575,740.94	10,505,453.39
	4.b. Non Bangunan	1,092,110.00	1,200,943.44	1,351,043.51	1,433,058.24	1,568,847.25
5	Perubahan Inventori	106,054.84	2,134,768.71	2,003,563.62	2,055,381.16	2,075,083.58
6	Ekspor	16,066,293.09	17,320,828.27	19,029,535.96	22,119,525.09	25,207,692.70
7	Impor	15,600,348.64	17,314,349.74	17,583,345.09	18,975,661.82	21,521,559.88
PDRB		45,055,530.09	50,602,097.14	56,377,371.43	62,513,680.47	67,476,071.80

Keterangan : * angka sementara, ** sangat sementara

**Lampiran 2. : Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jember Atas Dasar Harga Konstan
2010 Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah), 2013-2017**

Komponen Pengeluaran		2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	27,915,560.26	29,473,588.80	30,880,763.15	32,260,423.09	33,755,256.66
	1.a. Makanan, Minuman dan Rokok	11,910,730.49	12,465,099.17	12,856,220.63	13,338,610.84	13,940,199.05
	1.b. Pakaian dan Alas Kaki	987,268.08	1,036,693.11	1,072,412.15	1,109,211.51	1,153,371.40
	1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah	2,603,299.13	2,697,419.47	2,869,574.39	3,012,474.88	3,142,334.15
	1.d. Kesehatan dan Pendidikan	2,249,103.35	2,431,240.66	2,605,295.30	2,738,714.01	2,869,561.30
	1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	6,506,977.45	6,972,813.35	7,419,983.65	7,849,469.66	8,287,706.58
	1.f. Hotel dan Restoran	2,340,021.66	2,484,151.40	2,617,331.27	2,724,176.04	2,828,942.05
	1.g. Lainnya	1,318,160.10	1,386,171.64	1,439,945.75	1,487,766.16	1,533,142.12
2	Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga	664,788.22	734,718.06	745,852.57	768,646.37	778,584.36
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,360,033.76	2,426,691.11	2,484,636.95	2,304,053.31	2,391,337.70
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	7,259,365.44	7,621,883.02	8,158,677.57	8,582,200.63	9,067,737.03
	4.a. Bangunan	6,228,744.80	6,544,531.40	7,012,394.48	7,397,401.65	7,819,053.54
	4.b. Non Bangunan	1,030,620.64	1,077,351.61	1,146,283.09	1,184,798.98	1,248,683.49
5	Perubahan Inventori	42,433.65	1,154,565.90	1,004,337.13	999,218.67	1,005,413.83
6	Ekspor	14,186,753.61	14,652,161.53	15,524,990.29	16,896,172.38	18,304,148.64
7	Impor	12,909,701.49	14,091,929.97	14,576,693.31	15,277,154.50	16,389,518.44
PDRB		39,519,233.47	41,971,678.44	44,222,564.36	46,533,559.96	48,912,959.78

Keterangan : * angka sementara, ** sangat sementara

**Lampiran 3 : Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jember Atas
Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (persen), 2013-2017**

Komponen Pengeluaran		2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	72.34	70.40	68.74	66.99	66.53
1.a.	Makanan, Minuman dan Rokok	31.40	29.69	28.65	27.73	27.46
1.b.	Pakaian dan Alas Kaki	2.54	2.41	2.25	2.17	2.16
1.c.	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah	6.90	6.76	6.59	6.34	6.28
1.d.	Kesehatan dan Pendidikan	6.10	6.04	6.18	6.02	6.00
1.e.	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	15.99	16.13	15.76	15.66	15.71
1.f.	Hotel dan Restoran	6.26	6.24	6.31	6.12	5.99
1.g.	Lainnya	3.15	3.13	2.99	2.95	2.92
2	Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga	2.01	2.01	1.85	1.81	1.78
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6.60	6.07	5.89	5.27	5.26
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	17.79	17.29	17.40	17.61	17.89
4.a.	Bangunan	15.37	14.92	15.00	15.32	15.57
4.b.	Non Bangunan	2.42	2.37	2.40	2.29	2.33
5	Perubahan Inventori	0.24	4.22	3.55	3.29	3.08
6	Ekspor	35.66	34.23	33.75	35.38	37.36
7	Impor	34.62	34.22	31.19	30.35	31.90
PDRB		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Keterangan : * angka sementara, ** sangat sementara

**Lampiran 4 : Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jember
Atas Dasar Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (persen), 2013-2017**

Komponen Pengeluaran		2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5.14	5.58	4.77	4.47	4.63
	1.a. Makanan, Minuman dan Rokok	4.80	4.65	3.14	3.75	4.51
	1.b. Pakaian dan Alas Kaki	6.63	5.01	3.45	3.43	3.98
	1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah	2.53	3.62	6.38	4.98	4.31
	1.d. Kesehatan dan Pendidikan	6.87	8.10	7.16	5.12	4.78
	1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	5.41	7.16	6.41	5.79	5.58
	1.f. Hotel dan Restoran	5.86	6.16	5.36	4.08	3.85
	1.g. Lainnya	6.80	5.16	3.88	3.32	3.05
2	Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga	4.26	10.52	1.52	3.06	1.29
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6.48	2.82	2.39	-7.27	3.79
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	7.11	4.99	7.04	5.19	5.66
	4.a. Bangunan	7.96	5.07	7.15	5.49	5.70
	4.b. Non Bangunan	2.27	4.53	6.40	3.36	5.39
5	Perubahan Inventori	1,796.27	2,620.87	-13.01	-0.51	0.62
6	Ekspor	5.17	3.28	5.96	8.83	8.33
7	Impor	4.00	9.16	3.44	4.81	7.28
PDRB		6.06	6.21	5.36	5.23	5.11

Keterangan : * angka sementara, ** sangat sementara

**Lampiran 5: Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jember
(2010=100) Menurut Pengeluaran, 2013-2017**

Komponen Pengeluaran		2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	116.75	120.87	125.50	129.81	132.99
	1.a. Makanan, Minuman dan Rokok	118.78	120.54	125.65	129.94	132.93
	1.b. Pakaian dan Alas Kaki	115.96	117.51	118.38	122.49	126.59
	1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah	119.46	126.74	129.46	131.53	134.87
	1.d. Kesehatan dan Pendidikan	122.22	125.77	133.81	137.39	141.13
	1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	110.68	117.03	119.75	124.73	127.88
	1.f. Hotel dan Restoran	120.48	127.14	135.94	140.33	142.97
	1.g. Lainnya	107.64	114.39	117.17	124.16	128.58
2	Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga	135.96	138.44	139.72	147.58	154.09
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	125.91	126.55	133.70	143.01	148.39
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	110.44	114.78	120.22	128.27	133.16
	4.a. Bangunan	111.18	115.32	120.61	129.45	134.36
	4.b. Non Bangunan	105.97	111.47	117.86	120.95	125.64
5	Perubahan Inventori	249.93	184.90	199.49	205.70	206.39
6	Ekspor	113.25	118.21	122.57	130.91	137.72
7	Impor	120.84	122.87	120.63	124.21	131.31
PDRB		114.01	120.56	127.49	134.34	137.95

Keterangan : * angka sementara, ** sangat sementara

**Lampiran 6. Laju Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jember
Menurut Pengeluaran, 2013-2017**

Komponen Pengeluaran		2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3.57	3.53	3.83	3.43	2.45
	1.a. Makanan, Minuman dan Rokok	3.31	1.48	4.24	3.41	2.30
	1.b. Pakaian dan Alas Kaki	0.48	1.34	0.74	3.47	3.35
	1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah	6.11	6.10	2.14	1.60	2.54
	1.d. Kesehatan dan Pendidikan	2.68	2.90	6.39	2.68	2.72
	1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	4.11	5.74	2.32	4.16	2.53
	1.f. Hotel dan Restoran	3.23	5.52	6.92	3.23	1.89
	1.g. Lainnya	3.11	6.27	2.43	5.97	3.56
2	Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga	9.96	1.83	0.92	5.63	4.41
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.22	0.51	5.65	6.96	3.76
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.41	3.93	4.74	6.70	3.81
	4.a. Bangunan	1.39	3.73	4.58	7.33	3.79
	4.b. Non Bangunan	8.75	5.20	5.73	2.62	3.87
5	Perubahan Inventori	2.30	-26.02	7.89	3.11	0.34
6	Ekspor	4.32	4.38	3.69	6.80	5.20
7	Impor	6.54	1.68	-1.82	2.97	5.72
PDRB		2.79	5.75	5.74	5.38	2.69

Keterangan : * angka sementara, ** sangat sementara

DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
2. _____, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
3. *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
4. *Profil Ekonomi Rumah tangga 1998*, Jakarta 1999.
5. Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
6. Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, Washington DC, 1979.
7. Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
8. *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.
9. *Handbook of National Accounting for Production*, Sources and Methods, Series F No. 39, New York, 1986.
10. Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.
11. Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.

<https://jemberkab.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN JEMBER

Jl. Cendrawasih No. 20 Jember 68116 Jawa Timur, Indonesia

Telp. (0331) 487642 / Fax. (0331) 427553

Homepage : [Jemberkab.bps.go.id](https://jemberkab.bps.go.id); Email : bps3509@bps.go.id